



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
UNIT KERJA : DINAS KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : AKLIMA
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 667871

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.300.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/300 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000		
2. Tanah Seluas 320 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 300.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	524.300.000
1. MOBIL, HONDA HR-V Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 141.750.000		
2. MOBIL, TOYOTA INNOVA VENTURER Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 225.000.000		
3. MOBIL, KIA SONET STANDAR MT Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 157.550.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	----
D. SURAT BERHARGA	Rp.	290.000.000
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	642.879.194
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	2.757.179.194
III. HUTANG	Rp.	43.200.000
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	2.713.979.194

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
UNIT KERJA : RSJ PROF. HB. SAANIN PADANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **TAUFIK HIDAYAT**
2. Jabatan : **WAKIL DIREKTUR UMUM, KEUANGAN DAN SDM**
3. NHK : **638664**

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 790.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 223 m2/82 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 790.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 175.260.000

1. MOBIL, RUSH 1,5 S M/T TOYOTA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 140.100.000
2. MOTOR, HONDA SPM SOLO Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 7.160.000
3. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000
4. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 14.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 105.500.000

D. SURAT BERTHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 145.971.403

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 1.216.731.403

III. HUTANG Rp. 54.124.969

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 1.162.606.434

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan



dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 27 Januari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
UNIT KERJA : RSJ PROF. HB. SAANIN PADANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ILHAMI FITHRI
2. Jabatan : WAKIL DIREKTUR
3. NHK : 982426

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	1.075.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 177 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 755.000.000		
2. Tanah Seluas 458 m2 di KAB / KOTA PADANG PARIAMAN, HASIL SENDIRI Rp. 185.000.000		
3. Tanah Seluas 330 m2 di KAB / KOTA PADANG PARIAMAN, HASIL SENDIRI Rp. 135.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	439.000.000
1. MOTOR, HONDA PCX 160CC Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 28.000.000		
2. MOBIL, HONDA WRV Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 245.000.000		
3. MOTOR, YAMAHA AEROX Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp. 26.000.000		
4. MOBIL, HONDA BRIO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 140.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	140.630.000
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	127.148.011
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	1.781.778.011



III. HUTANG

Rp. 187.000.000

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 1.594.778.011

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
UNIT KERJA : RSJ PROF. HB. SAANIN PADANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : YOSI AFRIANI
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 904125

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 623.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/45 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI Rp. 510.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/36 m2 di KAB / KOTA PADANG PARIAMAN, HASIL SENDIRI Rp. 113.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 126.500.000

1. MOBIL, AVANZA TIPE G Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 109.000.000
2. MOTOR, HONDA SPD MTR SOLO Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 8.500.000
3. MOTOR, HONDA SOLO Tahun 2016, HASIL SENDIRI Rp. 7.500.000
4. MOTOR, HONDA SPD MTR SOLO Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 4.600.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 37.546.751

F. HARTA LAINNYA Rp. ----

Sub Total Rp. 791.646.751

III. HUTANG Rp. 491.398.004

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 300.248.747



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 4 Februari 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
UNIT KERJA : RSJ PROF. HB. SAANIN PADANG

I. DATA PRIBADI

1. Nama : HELENA DESFAROZA HAMZAH
2. Jabatan : BENDAHARA
3. NHK : 275129

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN	Rp.	430.000.000
1. Tanah dan Bangunan Seluas 120 m2/68 m2 di KAB / KOTA KOTA PADANG , HASIL SENDIRI , Rp. 430.000.000		
B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN	Rp.	140.675.000
1. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2007, HASIL SENDIRI Rp. 3.675.000		
2. MOBIL, HONDA BRIO SATYA Tahun 2020, WARISAN Rp. 137.000.000		
C. HARTA BERGERAK LAINNYA	Rp.	84.928.690
D. SURAT BERHARGA	Rp.	----
E. KAS DAN SETARA KAS	Rp.	106.172.202
F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	761.775.892
III. HUTANG	Rp.	128.743.475
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	633.032.417

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan



Nepotisme.

3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.